

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN KEBIJAKAN PSBB DI KOTA PEKANBARU
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUHAMMAD GUNAWAN GINTING

NIM. 1172410803

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ *Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah* ” yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Gunawan Ginting

NIM : 111724102803

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Gunawan Ginting
 NIM : 11724102803
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

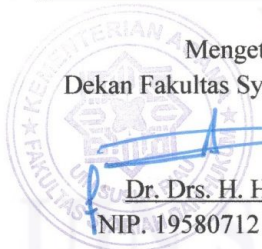
Ketua
 Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
 H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
 Drs. Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Gunawan Ginting (2020): Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi wabah virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Terdeteksi 1 orang pasien positif diduga terinfeksi Covid-19. Kemudian jumlah masyarakat di kota Pekanbaru semakin meningkat, ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan PSBB. Sedangkan dalam Islam sudah ada ayat yang memberikan peringatan keras agar masyarakat keharusan menaati *Ulil-Amr*, masyarakat Muslim seharusnya memahami arti penting menjaga kesehatan dan menaati *Ulil Amr*, karena menurut Fiqh Siyasah kretria pokok bagi seorang Muslim ialah harus melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta, diwajibkan menjaga yang telah dikemukakan oleh ulama'.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Pemerintah dalam penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB di kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PSBB di kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Wali Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang dikemudian di analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Pekanbaru sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap PSBB. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah penanganan Covid-19 termasuk dalam Siyasah al-syar'iyah. kemaslahatan masyarakat dan di tuntut menunjukkan keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan dengan mengesampingkan primordialisme politik, dan lainnya.

Kata kunci: Kebijakan, Covid-19, PSBB, Fiqh Siyasah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Sukarelawan Ginting), Ibunda (Katmini dan Misliana) dan adik perempuan (Miftahul Husna Auliawan Ginting) dan (Ghina Hasna Isnawan Ginting) adik laki-laki (Muhammad Habib Surya Pranata Ginting) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester tujuh.
2. Bapak Prof. Suyitno, M.Ag Plt Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Bapak Ahmad Adri riva'i, M.A yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Kepada Bapak Yunaldi selaku Sekda bagian Covid-19, Bapak Hamdan selaku kepala bagian pencegah dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan Ibu Nariusiana selaku Kasubag Dokumentasi Penyuluhan Hukum Wali Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Nor Fadillah, Imam Azizi Fadli, Imam Fahmi Alimuddin yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2021
Penulis

MUHAMMAD GUNAWAN GINTING
NIM 11724102803

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulis	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	16
B. Letak Geografis dan Demografis	18
C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Covid-19.....	24
B. Ciri-Ciri terinfeksi Virus Corona	25
C. Pengertian Kebijakan	26
D. Peraturan Daerah	29
E. Fungsi Kebijakan dan Tipe Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Aspek Tata Negara	37
F. Fiqh Siyasah	43
G. Fiqh Siyasah Dusturiyah	47
H. Kebijakan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatas Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Pekanbaru	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Kebijakan PSBB Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pandemi COVID-19	51
B. Faktor-Faktor penghambat dan pendukung Penerapan Kebijakan PSBB di kota Pekanbaru	55
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan PSBB Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pandemi COVID-19	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah>Nama Kelurahan Kota Pekanbaru.....	21
Tabel IV.1	Bagaimana bapak/ibu/saudara/i pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganannya Pandemi Covid-19	51
Tabel IV.2	Menurut bapak/ibu/saudara/i pengaruh tidak dalam hal perekonomian di kota pekanbaru	54

A. Latar Belakang

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemic Covid-19 ini.

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.¹

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Telah banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia),

¹ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang, Jurnal Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020. h. 241

Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).²

Covid-19 menjadi sebuah virus yang menggemparkan dunia di awal tahun 2020. Sebuah penyakit yang kemudian menjadikan banyak hal menjadi tidak biasa dalam kehidupan manusia. Semua orang seakan menghadapi sebuah wabah yang mengerikan dan mengancam nyawa setiap manusia yang dihindari oleh Covid-19.

China berhasil menerapkan kebijakan *lockdown* (PSBB) dan secara perlahan-lahan mulai bangkit memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negaranya.

Beberapa kebijakan pemerintah china yaitu:

1. Peningkatan pertama adalah menghentikan wabah dan mencegah penyebaran keseluruh wilayah dengan tindakan kesehatan darurat memberlakukan isolasi dan karantina yang ketat.
2. Untuk mencegahnya yaitu dengan sistem menyediakan pelaporan informasi *real time* dan yang tepatnya untuk mengatasi kesalahan informasi.
3. Pemerintah memberikan dukungan fisik, menciptakan kebijakan moneter dan keuangan untuk mencegah resesi ekonomi makro.³

Masuk ke wilayah Indonesia, Pada tanggal 17 juni 2020, Presiden Jokowi mengesahkan Inpres No. 4/2020 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemik global. Pada

² <https://kemlu.go.id/kabul/id/news/5980/virus-corona-atau-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2>. 09.10 wib.

³ Posman Sariguna Johnson Kennedy, Timothy Wisnu Harya P.S, Emma Tapubolon, Muhammad Fakhriansyah, *Analisis Strategi lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19*, Jurnal Image, Volume 9, no. 1, April 2020. h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Inpres disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan ketahanan Nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana alam akibat wabah penyakit, pandemik global, dan kimia yang berdampak nasional dan/atau global, Presiden menginstruksikan kepada semua menteri dan kepada daerah.⁴

Lalu dari ajaran Islam Keharusan menaati Allah, Rasulullah, dan *ulil-Amr* (pemegang kekuasaan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firmanNya, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. " Ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adi, ketika diutus oleh Rasulullah SAW di dalam satu pasukan khusus. Demikianlah yang dikeluarkan oleh seluruh jama'ah kecuali Ibnu Majah.⁵

Ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa selain

⁴ Rian Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global: Kasus Covid-19*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 6-8.

⁵ M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i) 2003, h. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

umat islam harus patuh dan taat kepada tuhan dan rasul-Nya, mereka juga diwajibkan taat kepada penguasa mereka. Kata *ulil amri* dalam ayat di atas juga merujuk kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayahnya (pemerintah).

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebar ke berbagai daerah Indonesia termasuk di Pekanbaru. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, pada tanggal 18 maret 2020 sudah terdeteksi 1 orang pasien positif Covid-19 di Riau. di nilai darurat tersebut, maka pada tanggal 22 maret 2020 wali kota Pekanbaru, Firdaus menetapkan status kota Pekanbaru menjadi tanggap darurat Covid-19.⁶

wabah penyakit yang disebut *thā'ūn* (طاعون). Istilah *thā'ūn* (طاعون) dalam Hadits diartikan sebagai wabah penyakit Covid-19. Rasulullah Saw sudah menyebut istilah tersebut dalam beberapa hadits¹⁸, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari beberapa orang sahabat, di antara Usamah bin Zaid:

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَجَزٌ، أَوْ بَقِيَّةٌ مِنْ عَذَابٍ عَذَّبَ بِهِ قَوْمٌ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ.” رواه أحمد

Artinya: “Dari Usamah dan kawan-kawannya, mereka berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sesungguhnya penyakit *thā'ūn* (طاعون) itu adalah suatu azab atau sisa dari suatu azab yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Apabila penyakit *thā'ūn* (طاعون) itu terjadi di suatu tempat, di mana kalian tinggal di dalamnya, maka janganlah keluar dari tempat itu untuk tujuan

⁶ Adlin, Ali Yusri, “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutuskan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kota Pekanbaru”, Jurnal ilmiah muqoddimah, jurnal ilmu sosial, politik, dan humaira, Universitas Riau, 2020. h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melarikan diri darinya. Apabila kalian mendengar bahwa penyakit itu sedang terjadi di suatu tempat, jangan kalian masuki (datangi) tempat itu.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa hadits ini memperkuat bahwa wabah penyakit thā’ūn (طاعون) sejenis Covid-19 adalah sisa dari hukuman (azab) yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw. dan terjadi pada masa Nabi. Buktinya adalah ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan bahwa penyakit thā’ūn (طاعون) itu pernah mewabah di Kufah, salah satu kota di Irak, dan juga pernah terjadi di Syam (Syria). Yang menarik dari berbagai hadis tentang penyakit thā’ūn (طاعون). Rasulullah Saw selalu mengingatkan dua hal. Pertama, jangan datangi daerah (negeri) yang sedang mewabah penyakit itu. Kedua, jangan tinggalkan daerahmu, jika penyakit itu sedang mewabah di negeri.⁷

Di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderita di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Metode di peritahkan yang telah di perintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain.

Setelah itu wali kota mengeluarkan peraturan Nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan corona virus *disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

Namun Melihat permasalahan di atas bahwasanya dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sudah diterapkan di Kota Pekanbaru sebagai bentuk upaya menekan pertumbuhan Covid-19, ternyata penulis masih menemukan gejala di lapangan sebagai berikut:

⁷ An- Nawawi, Al- Minhaj, *Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj*, (Kairo, Darul Hadis: 2001 M/122 H), Juz VII, h. 466.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Masih ditemukan masyarakat yang terpapar Covid-19 bahkan mengalami peningkatan.
2. Masih ditemukan masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan.
3. Masih ditemukan tidak melakukan *social distancing*

Karena permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru apakah sudah berjalan efektif untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19 termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan, serta bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PSBB DI KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah pada penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganan pandemi Covid-19, dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan PSBB Pekanbaru dalam menghadapi Pandemi Covid-19, serta faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PSBB Kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19 ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru Dalam penanganan Covid-19 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PSBB Kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid-19.

E. Kegunaan Penelitian

Secara Inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi *Khazanah* keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukun dan ketatanegaraan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁸

Jenis penelitian yang di lakukan adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru Adapun peneliti memilih lokasi ini karena Kota Pekanbaru masih ada yang terkena Covid-19. Selain itu, Kota Pekanbaru ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Walikota Pekanbaru, Gugus Tugas Covid-19 Pekanbaru, dan Dinas Kesehatan dan masyarakat kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana penerapan

⁸ Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen "*Analisa Data Kuantitatif*" diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia) 1992, h. 6.

kebijakan PSBB kota pekanbaru dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Pekanbaru yang berjumlah 6,39 juta jiwa.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁰ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹¹ Penelitian ini mengambil 10% sehingga sampel sebanyak 50 orang. Alasannya penulis adalah karena 6,39 juta jiwa tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 80.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hlm. 121

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Kesehatan, 1 orang Wali Kota Pekanbaru, 1 orang Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan 50 orang masyarakat.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan wawancara observasi dan alat lainnya.¹² Data penelitian ini yang menjadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung responden masyarakat di kota Pekanbaru melalui pengambilan angket (kuesioner) dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data diperoleh dari atau berasal dari bahan pustaka. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai praktek yang secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data skunder sebagai pemandu.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sekunder sebagai pemandu.

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

6. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana perapan kebijakan PSSB di Kota Pekanbaru.

c. Koesioner

yaitu pengumupulan data dengan cara memberik seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab.¹³

d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah¹⁴

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁵

f. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan

¹³ Sugiyono, Op.Cit; hlm. 199.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

¹⁵ *Ibid.* h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi penerapan PSBB di Kota Pekanbaru sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- 2) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.
- 3) Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

¹⁶ Sugiyono, *Metodolohi Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, (bandung: alfabeta, 2017) h. 245.

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Penulis

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum kota pekanbaru mengenai sejarah, dan letak geografis.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian kebijakan, fungsi dan tipe penanganan pandemi Covid-19) secara aspek tata negara, penerapan kebijakan pemerintah penanganan Covid-19 dalam perspektif Fiqih Siyasah, selanjutnya akan dibahas mengenai kebijakan darurat di Pekanbaru dalam penanganan pandemi Covid-19.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai kebijakan darurat Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru Faktor yang mendukung dan menghambat berjalannya PSBB dalam melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 di kota pekanbaru serta tinjauan Fikih Siyasah terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Secara administrative Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.¹⁷

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan Pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22

¹⁷ <https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai Ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution¹⁸.

Dari informasi diatas penulis dapat memahami bahwa Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, pusat Pendidikan, pusat Perdagangan, Industri dan jasa. Selain itu di pusat Kota Pekanbaru juga tersebar di Kecamatan-Kecamatan Dalam Kota Pekanbaru. Secara Administratif Kota Pekanbaru Memiliki 12 Kecamatan dan 58 kelurahan

¹⁸ *Ibid*, h. 21

B. Letak Geografis dan Demografis

Secara geografis letak kota pekanbaru secara kordinat $101^{\circ}14'-101^{\circ}34'$ bujur Timur dan $0^{\circ}25'-0^{\circ}45'$ lintang Utara. Pekanbaru memiliki posisi strategis karena berada di jalur lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, Jambi. Posisi Kota Pekanbaru bisa di katakan terletak di tengah-tengah Wilayah Provinsi Riau, yang membuatnya menjadi strategis untuk di jadikan Ibu Kota Provinsi Riau. Ada pun batasan administrasi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai besar yaitu sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, sungai Siak ini memiliki beberapa anak sungai yaitu: sungai Umban Sari, Air hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

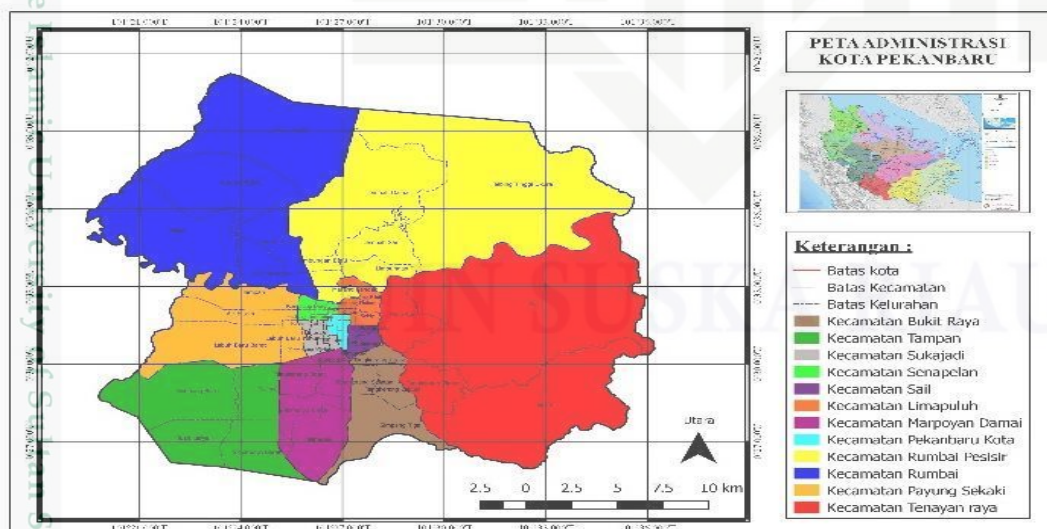
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, kota Pekanbaru di bagi atas 12 (dua belas) kecamatan.¹⁹

Dalam hal ini secara geografis pekanbaru ini memiliki posisi paling strategis dalam segi tempat dan wilayah di antara pertengahan lintas Timur Sumatra, Medan Padang dan Jambi.

Demografis pekanbaru Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan besar ini. Secara administrasi kota Pekanbaru di pimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai kepada Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Berikut peta



¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Diakses Tanggal 09-11-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umumnya digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang cukup memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau 24 dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil cukup besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Hal ini sejalan dengan perkembangannya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat dari berbagai provinsi.²⁰

Sebagai ibu Kota Pekanbaru masyarakat di Kota pekanbaru banyak bersuku melayu dan Minangkabau, dan pada Umumnya di Pekanbaru merupakan pengusaha, perdagangan dan ekonomi.

²⁰ Badan Pusat Statistik, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020, dari <https://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, 09-11-2020.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau kota Pekanbaru mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai kota kabupaten lainnya sebagai berikut :

Tabel II.1
Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah>Nama Kelurahan Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bukit Raya	1. Simpang Tiga 2. Tangkerang Labuai 3. Tangkerang Selatan 4. Tangkerang Utara 5. Air Dingin
2.	Tenayang Raya	1. Bambu Kuning 2. Bencah Lesung atau Sail 3. Kulim 4. Tangkerang Timur 5. Bambu Kuning 6. Industri Tenayan 7. Sialang Sakti 8. Sialang Rampai 9. Pebatuan 10. Pematang Kapau 11. Metagor 12. Melebung
3.	Tampan	1. Delima 2. Tuah Karya 3. Simpang Baru 4. Sidomulyo Barat 5. Air Putih 6. Tuah Madani 7. Bina Widya 8. Sialang Munggu 9. Tobek Godang
4.	Rumbai	1. Sri Meranti 2. Palas 3. Rumbai Bukit 4. Umban Sari 5. Muara Fajar 6. Muara Fajar Barat 7. Rantau Panjang 8. Agro Wisata 9. Maharani
5.	Rumbai pesisir	1. Limbung 2. Limbung Baru 3. Lembah Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Kelurahan
		4. Lembah Damai 5. Meranti Pandak 6. Tebing Tinggi Okura 7. Sungai Ukai 8. Singai Ambang
6.	Payung Sekaki	1. Air Hitam 2. Labu Baru Barat 3. Labu Baru Timur 4. Tampan 5. Sungai Sibam 6. Bandar Raya 7. Tirta Siak
7.	Marpoyan Damai	1. Maharatu 2. Sidomulyo Timur 3. Wonorejo 4. Tangkerang Barat 5. Tangkerang Tengah 6. Perhentian Marpoyan
8.	Sukajadi	1. Sukajadi 2. Harjosari 3. Kedungsari 4. Kampung Melayu 5. Jadirejo 6. Pulau Karam 7. Kampung Tengah
9.	Senapelan	1. Sago 2. Kampung Dalam 3. Kampung Baru 4. Padang Terubuk 5. Padang Bulan
10.	Sail	1. Cinta Raja 2. Suka Maju 3. Suka Mulia
11.	Lima Puluh	1. Rintis 2. Skip 3. Tanjung Rhu 4. Pesisir
12.	Pekanbaru Kota	1. Suka Ramai 2. Suma Hilang 3. Kota Tinggi 4. Kota Baru 5. Tanah Datar 6. Simpang Empat
	Jumlah Kecamatan 12	Jumlah Kelurahan 58

(sumber: Pekanbaru dalam Angka Tahun 2020 dari BPS Kota Pekanbaru)

C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru

Visi kota pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun

2001, Yaitu:

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, Pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Walikota Firdaus dan Wakil Walikota Edwar Sanger pekanbaru terpilih priode 2017-2022, menetapkan visi yaitu “*Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani.*”

Untuk mewujudkan visi itu yaitu

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saling tinggi
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan infrastruktur yang baik
4. Mewujudkan pembangunan Ekonomi Padat Modal, pada tiga sektor Unggulan, yaitu Jasa, perdagangan dan industry (oalahan dan MICE)
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).²¹

²¹ Pekanbaru.go.id, dari <https://pekanbaru.go.id> diakses, pada tanggal 02 November 2020 pukul 20.00 WIB

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Covid-19

Virus Corona adalah Virus yang umum ditemukan di lingkungan kita. Virus ini ditemukan sejak pertengahan 1960 dan dikenal sebagai virus yang menyebabkan gejala batuk dan pilek. Beberapa gejala lain yang ditemukan, antara lain demam, nyeri sendi dan diare. Jenis virus ringan ini masuk kedalam kategori virus *alfa Coronavirus* dan *beta Coronavirus*.²²

Pada tahun 2002-2003, muncul sejenis virus Corona baru bernama SARS-CoV yang termasuk dalam kelompok *beta Coronavirus*. Virus ini menyebabkan gejala berat pada organ pernapasan sehingga disebut dengan penyakit SARS (*severe acute respiratory syndrome*).²³

Virus Corona adalah Kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*Pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Atuce Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, pada tanggal 30 Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat bagian dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa Negara, termasuk Indonesia.²⁴

²² Jaka Pradipta, Ahmad Muslim Nazaruddin, *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 6.

²³ *Ibid*, h. 7.

²⁴ Idham Aziz, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2020), h. 1.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Virus ini sudah ada lama di tahun 1960 tetapi yang sangat banyak menyebar di akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Virus ini juga sangat cepat menularnya bahkan sampai keseluruhan Negara.

B. Ciri-Ciri terinfeksi Virus Corona

Gejalanya infeksi Corona sendiri cukup sulit di lihat pada terkena virus tersebut. hal ini tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala awal dari virus Corona Tersebut. Virus ini di butuhkan 14 hari sampai orang mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus Corona tersebut. bahkan mengisolasi diri itu lebih penting terutama bagi orang yang baru saja berpergian keluar negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terinfeksi virus Corona tersebut.

Gejala virus Corona yaitu ada beberapa ciri-ciri yang terinfeksi :

- (1) Demam
- (2) Batuk
- (3) Sesak nafas

Ada pula gejala tersebut pun yang tidak di pastikan mereka Covid-19, karena tidak semua penyakit yang di katakan di atas adalah ciri-ciri Covid-19. Dan yang paling lama virus tersebut berkembang selama 14 hari, setelah 14 hari virus itu sudah tidak ada lagi.

Adapun faktor yang mempengaruhi Covid-19

1. Tidak memakai masker
2. Berkerumunan

3. *Tidak menjaga jarak*
4. *Durasi bertemu dengan orang lain lebih dari 15 menit.*²⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penyakit Covid ini tidak terlihat dari kasat mata, dan penularannya paling lama 14 hari. Dan harus di selingi dengan pemberlakuan hidup sehat setiap harinya.

C. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Hukum, kebijakan bisa diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.²⁶

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan di artikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dll). Pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick di kutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagaimana serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

²⁵ Hamdan (Kepala Bagian Pencegah dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru) Wawancara, Tanggal 19 November 2020.

²⁶ Sudarsono, *kamus hukum*, Cet.II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang mana kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.²⁷

Sjachrab Basah, mengaktakan kebijakan dalam bahasa jerman (*freies Ermessen*) sebagai keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian *freies Ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, dimana hukum tidak mengaturnya, serta harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.²⁸

Menurut penulis yang mendefinisikan kebijakan itu semua dapat memecahkan permasalahan yang ada, dapat dipastikan kebijakan itu yang dibuat harus di pertanggung jawabkan dan dapat mengatur hukum yang ada. Berdasarkan pendapat ini adalah pedoman untuk menuntut membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan istilah kebijakan sendiri masih terjadi banyak pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:

²⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

²⁸ Tubagus Muhammad Nasaruddin, *Asas dan Norma Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2 (2016) h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik terus terang maupun kesimpulannya
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.²⁹

Dan Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.³⁰

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya yang di definisikan Solichin Abdul Wahab ialah kebijakan yang dibuat lebih dapat memahami secara

²⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 40-50.

³⁰ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) h. 90.

global/umum. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³¹ Peraturan daerah adalah salah satu bentuk Realisasi sebenarnya adalah otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Pada dasarnya peraturan daerah sudah benar Perundang-undangan yang lebih tinggi, melalui observasi Setiap wilayah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-

³¹ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) Hlm. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³²

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.³³

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.³⁴ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

³² Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM universitas bandung. 1995), h. 8

³³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005), h. 31

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 1 ayat (7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan

Rancangan peraturan daerah yang telah mencapai kesepakatan tentang: Diskusikan dan laporkan ke walikota oleh sekretaris distrik Disertai dengan catatan pengantar dari pimpinan DPRD kepada walikota. berurusan dengan Pembahasan dilakukan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. sebelum Diskusikan di DPRD sebelum penjadwalan Komite Peninjau DPRD. Pembahasan di ruang lingkup DPRD sangat padat Ini untuk kepentingan politik semua faksi. Tim kerja yang dilembagakan Legislasi diimplementasikan oleh panitia (A to D). Proses diskusi dimulai dengan Rapat paripurna DPRD dan kegiatan interpretasi walikota. lanjut Pandangan umum semua pihak dalam rapat paripurna DPRD. Langkah selanjutnya adalah Pembahasan panitia, panitia gabungan atau panitia khusus (pansus). Dalam pembahasan, jika DPRD menganggap perlu, bisa diselesaikan Bandingkan penelitian dengan daerah lain yang memiliki peraturan daerah yang sama Diskusikan substansi rancangan peraturan daerah. Dengan kondisi Proses diskusi dirasa sudah cukup, baru diambil keputusan Di rapat paripurna DPRD, barulah komentar terakhir Nilai: Penyampaian rancangan peraturan daerah Selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan Ketentuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Ini dilakukan oleh penanggung jawab area dengan tanda tangan Selambat-lambatnya 30 hari sejak draf regulasi daerah itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mekanisme proses Perda

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d. Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e. Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.³⁵

3. Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 dan 2. Kepala Daerah memiliki Tugas :

³⁵ Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Hlm 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 1

- (1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- (2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- (5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29 Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Kepala Daerah Berwenang :

Ayat 2

- (1) Mengajukan Rancangan Perda;
- (2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (3) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

Ayat 1

a) Membantu kepala daerah dalam:

- (1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- (3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur;
- (4) Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati / walikota;

b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;

c) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat 2

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimkasud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”

Setelah melihat tanggung jawab pemerintah Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Tentu kita bisa melihat dengan jelas seperti apa sistem pemerintahan itu Setiap wilayah memiliki aturan permainannya sendiri Lakukan hal yang sama seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal tersebut menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sama pentingnya Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus mendapat perhatian khusus, 31 Mengingat sebagai lembaga legislatif, DPRD harus menjalin kerjasama yang baik Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah bertindak sebagai kepala eksekutif daerah.

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideader Waarheid*).³⁶ dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), serta cita-

³⁶ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2009), h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*).Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 5 mengamanatkan

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh-oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

Pasal 18 ayat 5 ini kemudian diperkuat lagi dengan ayat 6 yaitu,

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD.³⁷ Dalam proses sinkronisasi eksekutif dan legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD harus bersatu guna mengembangkan perangkat hukum yang sehat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bercita-cita. Menurut Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 Tata cara terkait dalam Perpres No. ini adalah merumuskan peraturan daerah yaitu peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi gubernur / bupati /

³⁷ Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai dengan Manual*. (Jakarta, Prenada Media grup, 2010). H. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walikota.³⁸ DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan secara yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan menentukan, karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada Peraturan Daerah.³⁹

Sumber hukum dapat dibedakan kedalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983: 84-85), sumber hukum materiil adalah perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi penentu isi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah yang menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum.

E. Fungsi Kebijakan dan Tipe Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Aspek Tata Negara

Aspek Hukum Penanganan Penyebaran Covid-19 Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS),

³⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001

³⁹ Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Suatu Kajian Normatif)*, (Ujung Pandang, 1997), hlm 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).⁴⁰

Pembuatan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas konsep tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah:

1. Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing Adanya Social Distancing sejauh ini sangat mudah dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, maka dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan.

Social Distancing ini mengalami perubahan menjadi *Physical Distancing* sesuai dengan istilah yang digunakan WHO karena penggunaan istilah social distancing melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Dalam hal inilah kemudian berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian dirubah menjadi aktivitas yang dilakukan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran online (metode daring), penggunaan mekanisme WFH (*work from home*), penutupan tempat-tempat

⁴⁰ Toar palilingan (2020, April 20), *Aspek hukum dalam penanganan wabah COVID-19*. Manadopost.jawapost.com. Diunduh dari <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seperti perbelanjaan (mall) dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid 19.

2. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan.

Tenaga kesehatan berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi sehingga pemerintah perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkul keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Pemerintah Daerah harus mempunyai rasa tanggung jawab daerahnya masing-masing, maka dari itu harus melakukan tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi darurat penyebaran Covid-19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) adalah:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur Negara Indonesia. Kebijakan Lockdown tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di banyak negara, India misalnya menyebabkan chaos dan permasalahan sosial yang mengagetkan. Namun kunci dari hal

ini pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal untuk kemudian dapat menaklukkan coronavirus pandemi ini.

4. Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Informasi harus terbuka terkait COVID-19 menjadi sebuah kepastian saat ini. Informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu kembali kepada UU No.14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Pemerintah sebagai badan publik untuk membuka secara transparan kasus ini sejak awal.

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, pandemi COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh badan kesehatan dunia, WHO. Selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di luar UU No.14 Tahun 2008 untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular, yakni Pasal 17, Pasal 154 dan 155 UU No.36 tahun 2009. Di samping itu juga, pasal 79 dan 80 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengumpulan Data Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid 19 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu rapid test dan swap test dan dari kedua cara ini maka cara kedua merupakan cara yang dianggap paling efektif.. Keterbatasan dalam pemeriksaan metode swap test saat ini menjadi kendala yang besar dalam penanganan Covid 19.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di pekanbaru, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat.

Eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini. Kepolisian, aparat pemerintah daerah dari level tertinggi sampai level terendah, aparat TNI , Lembaga-lembaga negara perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk melakukan tindakan yang preventif terhadap penyebaran virus ini. Hal ini perlu untuk evaluasi kembali karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terinfeksi. pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah. Bahaya yang sangat besar yang akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan.⁴¹

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penanganannya dalam pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 untuk menjalankan secara bersama untuk percepatan penanganan pandemi dan wabah penyakit Covid-19, menjalankan tanggapan darurat bencana yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi dan wabah Covid-19 yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, di kategorikan sebagai bencana non alam yang juga berdampak pada jiwa (kehidupan) dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, kebijakan penanganan pandemic ini juga diperkuat dengan Undang-Undang No. Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang kekarantina.

F. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara Etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan.

⁴¹ Toar palilingan, *Op;cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴²

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyasah* adalah *Siyasah* berarti tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁴³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁴⁴

Berdasarkan definisi di atas *Fiqh Siyasah*, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk

⁴² Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 2.

⁴³ Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid.* h. 9.

⁴⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- (1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- (2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- (3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- (4) *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- (5) *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- (6) *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- (7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan)
- (8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)⁴⁵

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional da hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan.⁴⁶

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan

⁴⁶ Ibid. h. 16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴⁷

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*.⁴⁸

Dengan metode ini umat Islam boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash AlQur'an dan Hadis Nabi.

G. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga

⁴⁷ *Ibid.* h. 16.

⁴⁸ *Ibid.* h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁴⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

A.Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 177-178

⁵⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana,2003) ,h.47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

- a. bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliya al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah-masalah peradilan.
- d. bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁵¹

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Dalam keadaan Covid-19 ini.

H. Kebijakan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatas Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Pekanbaru

Pemerintah pada tahun 2020 masa pandemi COVID-19 merebak telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Pembatas Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagai regulasi yang nantinya dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan penanganan kondisi darurat kesehatan di Pekanbaru. Dalam

⁵¹ H.A.. Djauli *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan undang-undang tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal undang tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ;

Pada bab IV Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 74 tahun 2020 di sebutkan, selama pemberlakuan PSBB, setiap warga yang berdomisili di kota pekanbaru wajib melaksanakan perilaku hidup sehat bersih dan sehat (PHBS). warga juga diwajibkan menggunakan masker diluar rumah dan melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Peraturan itu juga mengatur pembatas aktifitas luar rumah selama pelaksanaan PSBB. Selama pemberlakuan PSBB

Dan penjelasan pasal 17 ayat 1 ayat 2, perwako 130/2020 selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi Administratif jika tidak bisa memenuhi Adminstratif dapat dikenakan sanksi kerja sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Virus COVID-19 menjadi pandemik yang ditetapkan WHO (World Health Organization) pada tanggal 11 Maret 2020. Virus yang katanya berasal dari kota Wuhan, China. Dengan tingkat penyebaran yang begitu cepat, penyakit ini bisa dari batuk atau bersin. Pemberlakuan PSBB adalah alternatif dalam menghentikan lajur penyebaran COVID-19. Alternatif ini juga berdampak buruk bagi setiap manusia.

berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif :

1. Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini.
3. Adanya tindakan kesehatan darurat yang memberlakukan isolasi dan karantina yang ketat jika ada yang terkena Covid-19.
4. Adanya dukungan fisik terhadap masyarakat

Dan Substansi kebijakan PSBB merupakan kebijakan pada intinya kebijakan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya merupakan kebijakan yang mengharuskan masyarakat menerapkan jarak sosial ketika berada di ruang publik antara satu dengan yang lainnya, serta menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

alat perlindungan diri apabila berinteraksi seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan banyak orang.

Berdasarkan kepada hasil analisis tersebut, maka penerapan kebijakan PSBB kedepannya perlu lebih memperhatikan aspek masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan cara antara lain yaitu memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai pemahaman akan manfaat kebijakan PSBB baik bagi warga masyarakat itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas, sehingga diharapkan akan memunculkan keinginan dan kemampuan dari setiap warga masyarakat untuk melaksanakan kebijakan PSBB dengan baik. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan agar kebijakan PSBB dapat berjalan lebih baik kedepannya yaitu dengan memastikan badan penyedia jasa layanan publik seperti kantor pemerintah, moda transportasi umum dan pusat perbelanjaan/swalayan tetap mendukung terlaksananya PSBB dengan cara menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik berdasar kepada aturan PSBB.

Menurut Fiqh Siyasah para ulama' ada 5 yaitu perlindungan agama (*hifdh ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdh an-nafs*), perlindungan akal (*hifdh 'aqla*), perlindungan keturunan (*hifdh nasl*) dan perlindungan harta (*hifdh mal*). Dalam konteks ini diwajibkan menjaga yang telah di kemukan oleh ulama' sama halnya berperang, pemberontakan dan lain-lain. inilah yang menjadi landasan Fiqh Siyasah untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan penerapan PSBB di Kota Pekanbaru, penulis menyarankan kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Pemerintah Pekanbaru terus belajar dalam mengadakan PSBB secara tepat dengan merencanakan PSBB ini secara optimal meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 dan lakukan segala bentuk penerapan agar penyakit ini cepat terselesaikan.
2. Bagi Dinas-Dinas terkait agar lebih berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat demi tercapainya masyarakat sehat dan memberikan pengawasan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan berikan pelayanan terbaik agar masyarakat sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An- Nawawi, Al- Minhaj, *Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj*, Kairo, Darul Hadis: 2001 M/122 H Juz VII.
- A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Bandung: Kencana, 2003
- Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Suatu Kajian Normatif)*, Ujung Pandang, 1997
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM universitas bandung. 1995
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM universitas bandung. 1995
- Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai dengan Manual*, Jakarta, Prenada Media grup, 2010
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2009
- _____, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005
- Idham Aziz, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2020
- Jaka Pradipta, Ahmad Muslim Nazaruddin, *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020
- Jalal Al-Din Abdurrahman Al-Syuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhar, Dar al-fikr Beirut*, 2011.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta, 2008
- M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003
- _____, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman *"Analisa Data Kuantitatif"* diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003
- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rian Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global: Kasus Covid-19*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2020).
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sugiyono, *Metodolohi Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, bandung: alfabeta, 2017
- Sudarsono, *kamus hukum*, Cet.II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2008).
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 1 ayat (7)
- Yulianti, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Grafindo Persada, 2009

Jurnal

- Aprista Ristiyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang, Jurnal Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2.
- Adlin, Ali Yusri, “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutuskan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kota Pekanbaru”, Jurnal ilmiah muqoddimah, jurnal ilmu sosial, politik, dan humaiora, Universitas Riau, 2020.
- Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, FSH UIN syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No.6 (2020)
- Muhammad Rasyid Ridho, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansi Dengan Covid-19*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- Posman Sariguna Johnson Kennedy, Timothy Wisnu Harya P.S, Emma Tapubolon, Muhammad Fakhriansyah, *Analisis Strategi lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19*, Jurnal Image, Volume 9, no. 1, April 2020
- Tubagus Muhammad Nasaruddin, *Asas dan Norma Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2 (2016)
- Tasri, *Hikmah di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 5, No. 1, April 2020.

Internet

- Badan Pusat Statistik, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020, dari <https://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, 09-11-2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://kemlu.go.id/kabul/id/news/5980/virus-corona-atau-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2>. 09.10 wib.

<https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Diakses Tanggal 09-11-2020

Pekanbaru.go.id, dari <https://pekanbaru.go.id> diakses, pada tanggal 02 November 2020 pukul 20.00 WIB

Toar palilingan (2020, April 20), *Aspek hukum dalam penanganan wabah COVID-19*. Manadopost.jawapost.com. Diunduh

dari <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>

Wawancara

Yunaldi, (Sekda bagian Covid-19) Kota Pekanbaru Wawancara, Tanggal 30 November 2020.

Narusiana, Kasubag dokumentasi penyuluhan Hukum Walikota Pekanbaru Wawancara, Tanggal 2 Desember 2020.

Hamdan (Kepala Bagian Pencegah dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru) Wawancara, Tanggal 19 November 2020.

Riky Pratama (masyarakat kota pekanbaru), wawancara, tanggal 28 Maret 2021



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganannya?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Bagaimana cara Wali Kota dalam menangani kendala tersebut jika ada ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan dalam penanganan PSBB ini?
5. Bagaimana pandangan Dinas Kesehatan/ Gugus Tugas Covid-19 terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam rangka penanganan Covid-19 dari segi kesehatan ?
6. Bagaimana peran Dinas Kesehatan/Gugus TugasCovid-19 dalam penanganan Covid-19 ?
7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan berjalannya dalam penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru?
8. Bagaimana pandangan Dinas Kesehatan/Gugus Tugas Covid-19 terkait pemberlakuan PSBB apakah benar bisa menghambat pertumbuhan Covid di Pekanbaru?
9. Menurut Dinas Kesehatan/Gugus Tugas Covid-19 mengapa PSBB ini dijadikan salah satu metode paling tepat dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru ?
10. bagaimana bapak/ibu/saudara/i pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganannya Pandemi Covid-19?
11. Menurut bapak/ibu/saudara/i pengaruh tidak dalam hal perekonomian di kota pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara ke Dinas Kesehatan



Wawancara dengan Bapak Hamdan, Kepala Bagian Pencegah dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

2. Wawancara ke Gugus Tugas Covid-19



Wawancara dengan Bapak Yunaldi, Sekda bagian Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Wawancara ke Wali Kota Pekanbaru



Wawancara kepada Ibu Narusiana, sebagai Kasubag dokumentasi penyuluhan Hukum Walikota Pekanbaru

4. Masyarakat Kota Pekanbaru



Pembagian angket dan wawancara kepada masyarakat pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gunawan Ginting

NIM : 1174102803

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penangan Pademi Covid-19 Di Tinjau Dari *Fiqh Siyash* adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Muhammad Gunawan Ginting
NIM. 11724102803

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Gunawan Ginting

NIM : 11724102803

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalikus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6320/2020
Sifat : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD GUNAWAN GINTING
NIM : 11724102803
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENERAPAN KEBIJAKAN PSBB DI PEKANBARU DALAM PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6320/2020

Sifat : Biasa

Temp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD GUNAWAN GINTING
NIM : 11724102803
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENERAPAN KEBIJAKAN PSBB DI PEKANBARU DALAM PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

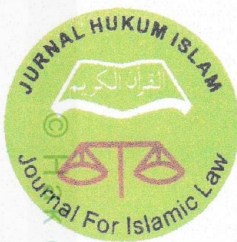


Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD GUNAWAN GINTING
NIM : 1172410803
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : PENERAPAN KEBIJAKAN PSBB DI KOTA PEKANBARU DALAM
 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TINJAU DARI FIQH
 SIYASAH

Pembimbing: Irfan Zulfikar, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Gunawan Ginting, lahir pada tanggal 11 Desember 1997 Duri, Kab. Bengkalis, Riau Penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Sukarelawan Ginting Ibu Katmini dan Misliana . Bertempat tinggal di Duri, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau Perumahan Btn Rokan Permai, Kab.

Bengkalis Provinsi Riau. Alamat email muhammadgunawanginting@gmail.com

Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai sekolah di SDS IMPRES Tanah Karo Mardinding dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMPS Cendana Duri 2 Tahun lalu di lanjutkan kepesantren Al-Aradyyyah Aceh Tenggara selama 2 Tahun dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan sekolah ke Pesantren Darul Arafah Raya Medan Selama 4 Tahun dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan selesai pada tahun 2021.

UIN SUSKA RIAU